



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU KHALID ARI BAGESA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
3. NHK : 409958

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.909.900.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1349 m2/435 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 7000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 2.100.000.000
4. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 450.000.000
5. Tanah Seluas 874 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 87.400.000
6. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 297.500.000
7. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
8. Tanah Seluas 922 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 208.200.000**

1. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI LX 150 C(KLX 150 S) Tahun 2013, HASIL



SENDIRI Rp. 19.000.000

4. MOBIL, ISUZU MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.0005. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
15.200.000**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **103.500.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **21.694.122****F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. **5.243.294.122****III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **5.243.294.122**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.